



## **UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENJAGA KEAMANAN MARITIM**

**Kuncoro Arry Prasetyo, Ansori Ansori, Buddy Suseto**

Prodi Strategi Pertahanan Laut, Fakultas Strategi Pertahanan,  
Universitas Pertahanan, Indonesia

### **Abstrak**

Dalam rangka membangun tata kelola maritim yang baik, sudahkah pemerintah Indonesia mengutamakan keamanan maritim pada masing-masing kebijakan maritimnya, namun nyatanya gagasan Poros Maritim Dunia yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia belum membayangi perspektif keamanan maritim. Tujuan akhir haruslah pembangunan kekuatan angkatan laut sebagai elemen pendukung terpenting. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dalam menangani isu keamanan maritim. Metode penelitian diskriptif kualitatif dan penggunaan datanya adalah data sekunder berupa literature review dan interpretasi yang ditemukan pada artikel jurnal sebelumnya dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menangani isu keamanan maritim diperlukan upaya pemerintah melalui pendekatan kers (hard effort) dan pendekatan lunak (soft effort).

**Kata Kunci:** Keamanan Maritim, Doktrin Maritim, Maritime Domain Awareness, Sea Power, hard effort, soft effort.

### **PENDAHULUAN**

2/3 wilayah Indonesia berupa perairan dan perairan Indonesia termasuk wilayah perairan tropis dengan daya dukung alam yang tinggi dan didukung kapasitas mega-biodiversity karena letak geografisnya.

Kondisi ini tentunya menarik bagi pemangku kejahatan yang berkepentingan untuk mencoba menanganinya secara illegal, karena dapat merusak dan membahayakan lingkungan laut. (Widyoutomo, 2020)

---

\*Correspondence Address : [kuncoroarryprasetyo@gmail.com](mailto:kuncoroarryprasetyo@gmail.com)

DOI : 10.31604/jips.v10i2.2023.977-984

© 2023UM-Tapsel Press

Perikanan merupakan industri yang berpotensi menghasilkan devisa negara. Demikian pula laut di Indonesia memiliki kekayaan potensi sumber daya ekonomi. Dengan demikian pemanfaatan sumber daya alam laut secara optimal, dapat memberikan dampak yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat. Meskipun Produk Domestik Bruto (PDB) belum banyak pada sektor perikanan, kenyataannya terhadap PDB nasional adanya peningkatan (Kementerian Perdagangan, 2014).

Dasar laut di kawasan tersebut tidak hanya kaya akan aneka ikan, tetapi juga mengandung ribuan mineral. Kawasan maritim Indonesia merupakan bagian dari jalur maritim dunia karena letaknya yang strategis dan juga memiliki potensi yang melimpah.

Karakteristik perairan Indonesia yang menjadi posisi silang yang strategis bagi kapal-kapal rute barat ke timur dan sebaliknya. Kebijakan Alur Lintas Kepulauan Indonesia (ALKI) membuat Indonesia makin terbuka. Beberapa perusahaan transportasi laut dan udara telah melewati wilayah Indonesia tanpa hambatan. Pemerintah berfokus kepada ancaman keamanan ketiga rute ALKI tersebut (Rustam, 2016). Gangguan yang paling utama di wilayah perairan atau maritim Indonesia adalah gangguan lalu lintas penumpang dan kargo.

Keamanan maritim Indonesia mempengaruhi keamanan daratan. Perkuatan keamanan maritim mencegah semua aktivitas ilegal di laut agar jangan sampai ke daratan. Kondisi ini juga membuatnya rentan terhadap lawan yang ingin mencari kekayaan maritim Indonesia. Kejahatan maritim selain illegal fishing adalah datangnya imigran illegal membawa masalah penyakit menular, penyelundupan illegal, narkoba dan penyelundupan manusia sampai dengan masalah yang berkaitan dengan teroris. (Prahenti, 2013). Masalah

lainnya adalah perompakan dan pembajakan.

Adapun kejahatan maritim berupa pembajakan/perompakan di laut, kejahatan penangkapan ikan, penjarahan harta di dasar laut terhadap muatan kapal yang karam, kejahatan ekosistem laut, kejahatan maritim, kejahatan konservasi sumber daya hayati dan ekosistemnya, kejahatan kepabeanan, kejahatan kehutanan, kejahatan keimigrasian . kejahatan pertambangan pasir laut, kejahatan pelanggaran wilayah (tanpa pengawasan keamanan), kejahatan napza, kejahatan senpi dan handak, kejahatan ZEEI, kejahatan teroris. kejahatan dilakukan di laut dan perairan yang masing-masing perbuatannya berbeda sifatnya (Iwan Setiawan, 2016).

Ancaman terhadap kejahatan maritim Indonesia dan kegiatan ekonomi sekitar perairan Indonesia akan meningkat. Selain itu, karena pertumbuhan populasi Asia, *World Trade Center* akan lebih fokus ke kawasan Asia di masa depan. Ancaman tersebut tidak hanya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia tetapi juga **Kreuzposition** Indonesia di dunia internasional. Keharusan Indonesia melakukan perbaikan untuk mencapai laut yang aman dengan gaung Poros Maritim Dunia, tentunya menjadi hal yang utama. (Anugerah, 2017b). maka kebijakan keamanan maritim menjadi prioritas utama pemerintah Indonesia

Keinginan pemerintahan Jokowi mewujudkan poros maritim dunia dengan pembangunan ekonomi maritim untuk kesejahteraan. kenyataannya banyak peluang ekonomi yang hilang. Secara lebih spesifik, gagasan Poros Maritim Dunia yang dinyatakan Jokowi berupaya menyederhanakan konektivitas antar pulau di Indonesia sehingga menghasilkan pembangunan ekonomi yang merata. (Al Syahrin, 2018).

Selain memanfaatkan letak geografis wilayahnya, keselamatan pelayaran dan keamanan laut merupakan kebutuhan mutlak bagi terwujudnya poros maritim dunia.

### **Keamanan Berkonsep Maritim**

Keamanan berkonsep maritim adalah scope dari konsep keamanan domestik nasional. Praktik keamanan domestik nasional menentukan bagaimana terwujudnya keamanan berkonsep maritim yang diimplementasikan kedalam kebijakan domestik nasional. Keamanan berkonsep maritim berada ditengah keamanan kerangka tradisional dan keamanan kerangka non-tradisional. Pada keamanan kerangka tradisional, pelanggaran maritim sebagai ancaman terhadap keutuhan nasional dimana pihak *state actors* adalah negara lawan, sedangkan kerangka non-tradisional pelaku-pelakunya *non-state actors* dilakukan oleh individu atau organisasi (Nugraha & Sudirman, 2016)

Bueger (2015) menyatakan keamanan berkonsep maritim meliputi empat kriteria yaitu *sea power*, *maritime security*, *deep sea economy* dan *human security*. *Sea power* melalui peran angkatan laut menjaga kelangsungan negara, menjaga rute transportasi laut untuk ekonomi perdagangan dan pembangunan. Tujuan keamanan maritim menggambarkan keamanan kapal dan peralatannya. Perdagangan dan perikanan menunjang pembangunan ekonomi.

Pentingnya laut bagi perdagangan dan perikanan, serta minyak dan mineral terkandung di dasar laut. Rekreasi Wisata pesisir juga merupakan sumber pendapatan ekonomi. Tujuan keamanan manusia berhubungan dengan keamanan maritim, yang mencakup elemen-elemen seperti akses ke bahan pokok makanan, tempat berlindung, perumahan yang

berkelanjutan, serta akses ke tempat kerja terbuka yang aman.

Keamanan berkonsep maritim merupakan kondisi lingkungan laut terbebas dari berbagai ancaman di laut sehingga keutuhan teritori Indonesia terjaga dan hukum nasional dan internasional di laut terwujud. adanya kekerasan di laut, eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam laut dan ekosistem biota laut, pelanggaran hukum dan ancaman terhadap pelayaran.

Karena sifat ancaman maritim yang *complicated* dan dinamis maka diperlukan kontribusi semua pemangku kepentingan, terutama para penegak hukum. Keamanan berkonsep maritim berfokus kepada kepentingan yang bersifat domestik nasional, rute laut yang aman dan damai, kredibilitas aparat penegak hukum di laut, terwujudnya rasa aman di kawasan, dan kerja sama dengan negara tetangga. (Anugerah, 2019)

Konsep pemerintah menjadikan Indonesia poros maritim dunia, oleh karena itu program pembangunan difokuskan dengan lima (lima) pilar utama, yaitu rekonstruksi budaya maritim Indonesia, komitmen perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam laut, dan pembangunan kedaulatan maritim. Industri perikanan menempatkan nelayan sebagai pilar utama, berkomitmen pada pembangunan infrastruktur dan mendorong konektivitas maritim dengan mengembangkan jalur laut, pelabuhan laut dalam, logistik dan pelayaran, serta wisata bahari. Diplomasi maritim mengajak seluruh mitra Indonesia untuk bekerja sama di bidang maritim. Indonesia berkomitmen membangun kekuatan pertahanan maritim (Frandi Kuncoro, 2015)

Mewujudkan poros maritim dunia di Indonesia dengan mengubah paradigma kota bukan hanya sebagai central eksploitasi sumber daya alam tetapi untuk berkembang menjadi

negara bahari sehingga diperlukan pembangunan dan pengembangan infrastruktur antar pulau di sepanjang pesisir masing-masing pulau. Jalan antar pulau ini sangat perlu dibangun untuk mempercepat lalu lintas komoditi barang dan jasa.

### **Konsep Pembuat Keputusan (The Decision Making)**

William N. Dunn (2003) berpendapat bahwa analisis kebijakan publik merupakan disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode penelitian dan argumen untuk menghasilkan informasi yang relevan untuk mengatasi masalah kebijakan.

Analisis kebijakan bukanlah sebuah keputusan, seperti pendapat Kimartini (2019)

*The product of policy analysis is advice. Specifically, it is advice that inform some public policy decision.*

Oleh karena itu, analisis kebijakan publik menjadi saran atau bahan refleksi bagi para perumus kebijakan, yang meliputi isu-isu terkait dengan isu tersebut, peran organisasi publik, dan berbagai alternatif strategi yang dapat diimplementasikan melalui berbagai penilaian. sesuai dengan tujuan politik.

Menurut Quade (1982) mengemukakan bahwa

*“Policy analysis is evaluable, because it can help a decision maker by providing information through research and analysis, isolating and clarifying issues, revealing inconsistencies in aims, and effort, generating new alternative and suggesting ways of translating ideas into feasible and realizable policies. Its major contribution may be to yeald insight particularly with regard to the dominance and sensitivity of the parameters. It is no more than adjunct, although a powerful one, to the judtment , intuition, and experience of decision makers”.*

Oleh karena itu, analisis kebijakan publik merupakan penelitian terapan yang bertujuan untuk memahami berbagai masalah publik guna mencapai pemecahan masalah yang lebih baik.

Kismartini (2019) berpendapat bahwa analisis kebijakan publik merupakan suatu keadaan yang berhubungan antara pilihan dan tujuan kebijakan.

Pentingnya analisis kebijakan karena dapat menolong para pengambil keputusan guna menyebarkan informasi yang didapat dari penelitian dan analisis, mengisolasi dan menjelaskan masalah yang akan diklarifikasi, mengungkapkan ketidak konsistenan tujuan dan aspirasi, menawarkan pilihan baru, dan menyarankan cara untuk menerjemahkan ide ke dalam kebijakan. Mudah diimplementasikan. Kontribusi utamanya adalah memberikan masukan, terutama mengingat prioritas dan sensitivitas parameter (Kismartini, 2019).

Dalam rangka memantapkan Poros Maritim Dunia, pemerintah telah menerbitkan kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk mengutamakan keamanan dalam scope maritim.

### **METODOLOGI**

Metodologi penelitian ini bersifat deskriptif yang menjelaskan gambaran dengan pengetahuan dan fakta riil tentang upaya pemerintah menerapkan keamanan bidang maritim. Data sekunder diperoleh dari hasil penelitian literatur dan interpretasi materi dari artikel jurnal independen digunakan sebagai tipe data. Pada analisis data menggunakan kualitatif, dimana data informasi yang diperoleh dianalisis kandungannya untuk membantu permasalahan yang diteliti sehingga materinya relevan. Teknik dalam pengumpulan data menggunakan studi pustaka yang mengkompulir informasi teoritis konseptual dari media

online yakni artikel jurnal yang berkaitan dengan tema penelitian yang menjadi dasar refleksi dan pembahasan ini.

### **Hasil Penelitian**

Strategi pemerintah dalam menjaga keamanan bidang maritim melalui dua pendekatan yakni pendekatan secara keras (*hard effort*) dengan melaksanakan perkuatan pertahanan maritim, tegasnya penegakan keamanan untuk melindungi teritori laut beserta sumber daya alam, dan pendekatan lunak dengan memperkuat diplomasi dan negosiasi maritim (Kemaritiman, 2018). Semua pendekatan tersebut bertujuan untuk Indonesia sebagai poros maritim dunia.

### **Pendekatan Keras (*Hard Effort*)**

Untuk melindungi wilayah laut dan sumber daya alam melalui penguatan pertahanan dan keamanan laut diperlukan unsur-unsur yang terbagi dalam tiga komponen. Ketiga komponen tersebut harus dimiliki secara berturut-turut. Untuk mengimplementasikannya agar masalah keamanan maritim ditangani secara memadai.

**Pertama**, pemerintah harus terlebih dahulu menetapkan doktrin maritim sebagai landasan kebijakan.

**Kedua** percepatan pembangunan *Maritime Domain Awareness (MDA)* di seluruh pelosok tanah air.

**Ketiga** setelah terpenuhinya dua elemen ini maka pemerintah dapat fokus membangun angkatan laut sebagai alat untuk mengatasi masalah keamanan maritim. (Edrian, 2017)

1. Doktrin Maritim sebagai dasar pembuatan kebijakan (Konsensus)

Ketika Presiden Jokowi membahas gagasan Poros Maritim Dunia pada KTT Asia Timur (EAS) di Naypitaw,

Myanmar pada November 2014, banyak pemimpin negara mengira Jokowi menjelaskan suatu doktrin maritim di Indonesia. Hal tersebut adalah salah, sehingga apa yang dijelaskan Jokowi dalam EAS merupakan diskripsi dari lima misi Jokowi yang mengarah pada visi membangun Indonesia sebagai negara terdepan dalam pelayaran. Oleh karena itu, penjelasan tentang doktrin maritim erat kaitannya dengan keamanan maritim.

Nantinya penerapan doktrin tersebut, maka harus memuat pernyataan dan gambaran yang lengkap bagaimana Indonesia di masa damai atau perang, dalam lingkup keamanan di bidang maritim. Doktrin tersebut menyatakan dengan gamblang posisi TNI AL sebagai leader masalah keamanan di bidang maritim dan perannya dalam mengawal kebijakan maritim pemerintah untuk bersinergi bersama institusi maritim lainnya. Doktrin maritim tersebut juga menjabarkan peranan TNI Angkatan Laut di seluruh tanah air bersama dengan aktor lainnya dalam menjaga aset nasional Indonesia. Doktrin tersebut juga menjabarkan peran aktif TNI Angkatan Laut dan instansi maritim lainnya dalam mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang hebat.

2. Memahami Laut Melalui *Maritime Domain Awareness (MDA)*

Salah satu kebijakan dan inisiatif TNI AL adalah pengembangan *Maritime Domain Awareness (MDA)*. Melihat perkembangan Lingstra dan tatanan konstelasi geografis Indonesia dimana sektor maritim di negara maju terus dikembangkan untuk meningkatkan perekonomiannya. TNI Angkatan Laut berupaya untuk meningkatkan kesadaran maritimnya dengan melaksanakan pembangunan pertahanan yang diproduksi sendiri berupa pembangunan kapal, *submarine*

serta pesawat tempur sebagai perwujudan untuk meningkatkan kesadaran di bidang maritim.

Pada segi teknis, Pembangunan *submarine* juga mendorong perusahaan bidang maritim untuk memenuhi sendiri alutsistanya melalui ToT (*Transfer of Technology*), pada segi politik peningkatan *deterrence* dan daya negosiasi di kawasan dan daerah-daerah. pada segi pertahanan keamanan, terjaganya dan terjaminnya keutuhan serta kedaulatan di laut yurisdiksi nasional sehingga dapat memberikan kontribusi untuk kemakmuran, terjaminnya ketahanan nasional serta sosial budaya dapat memberikan kebanggaan akan memandang laut sebagai alat pemersatu dan semangat kesejahteraan bangsa.

Pada Program Pembinaan Kemandirian Sistem Pertahanan, banyaknya pihak swasta maupun BUMN yang akan mengikuti program tersebut karena akan berpeluang membuka bisnis dan investasi untuk kemandirian alutsista diantaranya galangan kapal milik negara dan swasta.

Dengan banyaknya peluang bisnis bidang maritim akan berkontribusi kepada keterlibatan publik untuk mendukung pengembangan injasmar dalam rangka menumbuhkan kesadaran bidang maritim yang semakin terintegrasi. (Anugerah, 2017a)

### 3. Membangun kekuatan laut (*sea power*) Mulai Dari Militer

Kekuatan laut tidak sebatas angkatan lautnya, tetapi kekuatan laut mencakup semua sumber daya kekuatan laut nasional yang dimilikinya untuk mengelola perdagangan internasional dan ekonomi bidang maritim serta penggunaan dan penguasaan sumber daya kelautan.

Kekuatan Angkatan Laut yang didukung oleh perekonomian maritimnya merupakan sarana (alat)

untuk berdiplomasi, pencegahan dan pengaruh politik di masa damai, dan sebagai alat untuk operasi angkatan laut di masa perang. Oleh karena itu, kekuatan laut sangat penting bagi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, dimana unsur angkatan laut menjadi aset untuk membangun serta memanfaatkan kekuatan lautnya. (Anugerah, 2017c)..

### Pendekatan Lunak (*Soft Effort*)

Generasi sekarang sedini mungkin dikenalkan dengan masalah kelautan melalui sarana pengajaran agar timbul rasa memiliki akan lautnya untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maritim.

Selesai melalui pendekatan secara keras (*hard effort*) seperti penerapan doktrin bidang maritim, kesadaran ranah maritim dan kekuatan maritim, pemerintahanpun menempuh jalan lunak (*soft effort*).

#### 1. Memperkuat Upaya Diplomasi Maritim

Diplomasi berdimensi maritim adalah negosiasi antara dua atau lebih negara mengenai batas maritim, kerja sama maritim, dan keamanan maritim.

#### 2. Berperan aktif di ASEAN dan IORA serta IOM

Diplomasi maritim Indonesia di kawasan menggabungkan dua pendekatan. Pertama, *soft diplomacy maritim* melalui kerjasama persuasi, dan penegakan hukum tingkat Negara Anggota ASEAN, antara lain ASEAN Maritime Forum (AMF) dan Expanded ASEAN Maritime Forum. EAMF) selanjutnya melalui Indian Ocean Rim Regional Association (IORA) kemudian melalui organisasi antar pemerintah terkemuka di bidang migrasi, bekerja sama dengan mitra pemerintah, organisasi antar pemerintah dan

organisasi non-pemerintah. Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM).

## **KESIMPULAN**

Sulitnya pendekatan dalam menangani keamanan bidang maritim untuk membangun poros maritim dunia memang tidak bisa dikatakan ideal, pemerintahan Jokowi terlalu memperhatikan aspek ekonomi dan kurangnya unsur pendukung kebijakan bidang maritim Indonesia. Karena keamanan bidang maritim merupakan salah satu kunci berhasilnya penyelenggaraan negara yang berwawasan maritim maka sudah sepantasnya pemerintah fokus kepada Poros Maritim Dunia pada isu keamanan maritim, diawali langkah demi langkah dari penjabaran doktrin maritim., Pendirian MDA serta peran Angkatan Laut. Untuk menjadi negara berdimensi maritim yang kuat dan disegani tentu tidaklah cepat, namun bisa diatasi apabila terjaganya keamanan dan stabilitas perairan Indonesia dan sekitarnya yang didukung dengan kebijakan maritim yang strategis. *Soft approach* Indonesia dengan upaya diplomasi maritim untuk terwujudnya visi menjadi poros maritim dunia melalui kerja sama persuasi, dan kekuatan laut harus diperkuat.

Namun, pendekatan tanpa kompromi Indonesia harus hati-hati. Karena pendekatan yang sulit akhirnya bisa menjadi jebakan untuk mencapai keuntungan yang diinginkan melalui kerja sama persuasi. Kinerja Indonesia dalam tersampainya gagasan, saran, *reccomended* dan lainnya dalam berbagai event baik di tingkat bilateral, trilateral maupun multilateral menunjukkan upaya Indonesia untuk bangkit dan memajukan kepentingannya di bidang maritim. Namun pada saat yang sama, sikap agresif Indonesia di perairan teritorialnya, melalui kebijakannya membakar dan menenggelamkan kapal-kapal asing, dapat mengganggu

hubungan baik dengan negara di Asia Tenggara.

Selain itu, artikel ini memperkenalkan upaya diplomasi bidang maritim melalui kerja sama persuasi. Kenyataannya diplomasi bidang maritim tidak hanya mencakup Angkatan Laut (diplomasi maritim), tetapi mencakup beberapa lembaga negara dan pemerintahan. Hasil kajian ini menjelaskan bahwa diplomasi maritim Indonesia dilakukan melalui integrasi sumber daya yang berbeda dan pelibatan aktor yang berbeda menuju kesamaan visi dan aspirasi membangun poros maritim dunia. Hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi bagi pengembangan penelitian diplomasi maritim, memperkaya khazanah penelitian politik luar negeri Indonesia serta penelitian di kawasan Asia Tenggara dan ASEAN.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Al Syahrin, M. N. (2018). Kebijakan Poros Maritim Jokowi dan Sinergitas Strategi Ekonomi dan Keamanan Laut Indonesia. *Jurnal Indonesian Perspective*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.14710/ip.v3i1.20175>
- Anugerah, P. T. (2017a). Maritime Domain Awareness Concept. *Jurnal Keamanan Maritim*, 2(1), 12–21.
- Anugerah, P. T. (2017b). Maritime Security and Maritime Power Concept. *Jurnal Keamanan Maritim*, 4(1), 9–15. <https://doaj.org/article/f820bd6e28cf44988e96d72e946a06ff>
- Anugerah, P. T. (2017c). Sea Power Security Good Order at Sea. *Jurnal Keamanan Maritim*, 4(1), 9–15. <https://doaj.org/article/f820bd6e28cf44988e96d72e946a06ff>
- Anugerah, P. T. (2019). Kebijakan dan Strategi Keamanan Maritim. *Jurnal Keamanan Maritim*, 1(1), 1.
- Bueger, C. (2015). What is maritime security. *Jurnal Maritime*, 1(1), 1–11.
- Edrian, M. (2017). Melihat Keamanan

Maritim Indonesia. *Jurnal Keamanan Maritim*, 2(1), 17–24.  
<http://ejournal.lembagakeris.net/index.php/Defendonesia/article/view/60>

Frandi Kuncoro. (2015). Membangun Kekuatan Nasional Dengan Mewujudkan Visi Poros Maritim Dunia. *Jurnal Pertahanan*, 5(2), 175.  
<http://www.tribunnews.com/bisnis/2014/07/04/gagas-poros-maritim-dunia-jokowi-sadari-masa-depan-ada-di->

Iwan Setiawan. (2016). Beragam Tindak Pidana Laut Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 4(1), 115.  
<https://doi.org/10.25157/jigj.v4i1.415>

Kemaritiman, K. bidang. (2018). *Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Dan Investasi Tahun 2020-2024*. 8, 1-16.

Kementerian Perdagangan. (2014). Laporan Akhir Analisis Kebijakan Impor Ikan dan Produk Perikanan. *Jurnal Maritim*, 1(1), 1-59.

Kismartini. (2019). *Analisis Kebijakan Publik ( Kerangka Dasar )* (1st ed.). Semarang:Undip Press.

Nugraha, M. H. R., & Sudirman, A. (2016). Maritime Diplomacy Sebagai Strategi Pembangunan Keamanan Maritim Indonesia. *Jurnal Wacana Politik*, 1(2).  
<https://doi.org/10.24198/jwp.v1i2.11059>

Prahenti, D. S. (2013). Dampak Singgahnya Pencari Suaka Ke Australia Terhadap Ancaman Keamanan Non-Tradisional Bagi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Perikanan Dan Kelautan*, 1(1).

Quade, E. S. (1982). *Analysis For Public Decisions* (2nd ed.). New York:North Holland.

Rijal, N. K. (2019). Smart Maritime Diplomacy: Diplomasi Maritim Indonesia Menuju Poros Maritim Dunia. *Jurnal Global & Strategis*, 13(1), 63.  
<https://doi.org/10.20473/jgs.13.1.2019.63-78>

Rustam, I. (2016). Tantangan ALKI dalam Mewujudkan Cita-cita Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. *Jurnal Indonesian Perspective*, 1(1), 1-21.  
<https://doi.org/10.14710/ip.v1i1.10426>

Widyoutomo, A. (2020). Pengamanan laut mewujudkan keamanan maritim Indonesia.

*Jurnal Maritim*, 1(1), 1-16.

william N. Dunn. (2003). *William-N.-Dunn-Pengantar-Analisis-Kebijakan-Publik-Gadjah-Mada-University-Press-2003\_compressed-1.pdf*. Gadjah Mada University Press.